



DOI: <https://doi.org/10.38035/jafm.v6i5>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Systematic Literature Review: Pencegahan Fraud Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Sistem Pengendalian Internal, Whistleblowing System, E-procurement dan Komitmen Organisasi

Rani Nur Az-zahra Osman¹, Sri Rahayu², Wirmie Eka Putra³

¹Universitas Jambi, Jambi, Indonesia, raniazzahra266@gmail.com

²Universitas Jambi, Jambi, Indonesia, sri_rahayu@unja.ac.id

³Universitas Jambi, Jambi, Indonesia, wirmie_eka@unja.ac.id

Corresponding Author: raniazzahra266@gmail.com¹

Abstract: *This systematic literature review examines the prevention of fraud in government procurement of goods and services through internal control systems, whistleblowing systems, e-procurement, and organizational commitment. The study aims to synthesize existing research findings on the factors influencing fraud prevention in public procurement processes. Using a systematic review methodology, this research analyzes 20 relevant studies published between 2020-2025. The findings reveal that internal control systems, whistleblowing systems, and e-procurement significantly contribute to fraud prevention, while organizational commitment serves as a mediating factor that strengthens these relationships. The review identifies the Fraud Triangle theory as the dominant theoretical framework, which has evolved into the Fraud Diamond, Fraud Scale, and Fraud Hexagon models. Key dimensions examined include control environment, risk assessment, control activities, information and communication, and monitoring for internal controls; structural, operational, and maintenance dimensions for whistleblowing systems; e-tendering, e-catalogue, e-purchasing, and national procurement portals for e-procurement; and affective, continuance, and normative commitment for organizational commitment. The results indicate mixed findings across studies, suggesting the need for contextual understanding of these variables in different organizational settings.*

Keywords: *Fraud Prevention, Internal Control System, Whistleblowing System, E-Procurement, Organizational Commitment*

Abstrak: Tinjauan literatur sistematis ini mengkaji pencegahan *fraud* dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui sistem pengendalian internal, *whistleblowing system*, *e-procurement*, dan komitmen organisasi. Penelitian ini bertujuan untuk mensintesis temuan penelitian yang ada mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pencegahan *fraud* dalam proses pengadaan publik. Menggunakan metodologi tinjauan sistematis, penelitian ini menganalisis 20 studi relevan yang dipublikasikan antara tahun 2020-2025. Temuan mengungkapkan bahwa sistem pengendalian internal, *whistleblowing system*, dan *e-procurement* berkontribusi signifikan terhadap pencegahan *fraud*, sementara komitmen organisasi berperan sebagai faktor mediasi yang memperkuat hubungan-hubungan tersebut.

Tinjauan ini mengidentifikasi teori *Fraud Triangle* sebagai kerangka teoretis dominan, yang telah berevolusi menjadi model *Fraud Diamond*, *Fraud Scale*, dan *Fraud Hexagon*. Dimensi-dimensi kunci yang dikaji meliputi lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan untuk pengendalian internal; dimensi struktural, operasional, dan perawatan untuk *whistleblowing system*; e-tendering, e-catalogue, e-purchasing, dan portal pengadaan nasional untuk *e-procurement*; serta komitmen afektif, berkelanjutan, dan normatif untuk komitmen organisasi. Hasil menunjukkan temuan yang beragam di berbagai penelitian, mengindikasikan perlunya pemahaman kontekstual terhadap variabel-variabel ini dalam pengaturan organisasi yang berbeda.

Kata Kunci: Pencegahan *Fraud*, Sistem Pengendalian Internal, *Whistleblowing System*, *E-Procurement*, Komitmen Organisasi

PENDAHULUAN

Fraud dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan permasalahan serius yang mengancam efektivitas pengelolaan keuangan negara dan pembangunan nasional. Menurut Association of Certified *Fraud* Examiners (ACFE) Global dalam laporan *Occupational Fraud 2025*, kerugian akibat *fraud* mencapai miliaran dollar setiap tahunnya di seluruh dunia. Di Indonesia, ACFE Indonesia Chapter melaporkan dalam Survei *Fraud* Indonesia 2025 bahwa sektor pengadaan barang dan jasa pemerintah menjadi salah satu area yang paling rentan terhadap praktik kecurangan (ACFE Indonesia Chapter, 2025).

Pengadaan barang dan jasa pemerintah memiliki peran strategis dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, proses pengadaan harus dilaksanakan dengan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. Namun, dalam praktiknya masih banyak ditemukan penyimpangan yang merugikan keuangan negara dan menghambat pencapaian tujuan pembangunan.

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan tinjauan sistematis terhadap literatur yang membahas pencegahan *fraud* dalam pengadaan barang dan jasa melalui sistem pengendalian internal, *whistleblowing system*, *e-procurement*, dan komitmen organisasi. Tinjauan sistematis ini penting untuk mengidentifikasi pola temuan, kesenjangan penelitian, dan memberikan rekomendasi untuk penelitian masa depan serta praktik pencegahan *fraud* yang lebih efektif.

Pertanyaan penelitian yang diajukan dalam *systematic literature review* ini adalah: (1) Bagaimana sistem pengendalian internal berperan dalam pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa? (2) Bagaimana *whistleblowing system* berkontribusi terhadap pencegahan *fraud*? (3) Bagaimana *e-procurement* mempengaruhi pencegahan *fraud*? (4) Bagaimana peran komitmen organisasi dalam memperkuat pencegahan *fraud*? (5) Apa saja temuan konsisten dan inkonsisten dari penelitian-penelitian terdahulu?

METODE

Penelitian ini menggunakan metode *systematic literature review* untuk menganalisis publikasi ilmiah yang relevan dengan pencegahan *fraud* dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Proses pencarian literatur dilakukan melalui database jurnal internasional dan nasional yang bereputasi, dengan periode publikasi 2020-2025.

Kriteria inklusi dalam penelitian ini meliputi: (1) artikel jurnal yang membahas pencegahan *fraud* dalam pengadaan barang dan jasa, (2) penelitian yang mengkaji sistem pengendalian internal, *whistleblowing system*, *e-procurement*, atau komitmen organisasi sebagai variabel penelitian, (3) publikasi dalam bahasa Indonesia atau Inggris, dan (4) artikel yang dipublikasikan dalam jurnal bereputasi. Kriteria eksklusi meliputi artikel yang tidak

relevan dengan konteks penelitian, publikasi yang tidak memiliki metodologi yang jelas, dan artikel yang tidak dapat diakses secara penuh.

Proses seleksi literatur dilakukan dalam beberapa tahapan: (1) identifikasi artikel melalui pencarian database, (2) screening judul dan abstrak, (3) penilaian kelayakan artikel secara penuh, dan (4) ekstraksi data dari artikel yang memenuhi kriteria. Dari proses seleksi ini, diperoleh 20 artikel yang relevan untuk dianalisis secara mendalam.

Analisis data dilakukan dengan mengidentifikasi tema-tema utama, mengkategorikan temuan berdasarkan variabel penelitian, dan melakukan sintesis hasil penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian. Kerangka teoritis yang digunakan sebagai landasan analisis adalah *Fraud Theory*, khususnya *Fraud Triangle* yang dikembangkan oleh Donald R. Cressey pada tahun 1953, serta perkembangannya menjadi *Fraud Diamond*, *Fraud Scale*, dan *Fraud Hexagon*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Teori *Fraud*

Fraud theory atau teori kecurangan telah berkembang sejak lama, menawarkan perspektif yang berbeda dalam memahami motivasi dan penyebab perilaku curang. Akar teori *fraud* dapat ditelusuri kembali ke tahun 1953 ketika Donald R. Cressey memperkenalkan konsep *Fraud Triangle* yang memaparkan tiga elemen kunci yang memicu individu untuk terlibat dalam perilaku curang: tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), dan rasionalisasi (*rationalization*) (Homer, 2020).

Teori ini kemudian berkembang menjadi *Fraud Diamond* pada tahun 2004 oleh ACFE yang menambahkan elemen keempat yaitu kapabilitas (*capability*). Widnyana dan Widyawati (2022) menjelaskan bahwa kapabilitas merujuk pada kemampuan, keterampilan, atau pengetahuan yang dimiliki pelaku untuk melakukan kecurangan. Perkembangan selanjutnya adalah *Fraud Scale* yang diperkenalkan oleh David T. Wolfe dan Dana R. Hermanson pada tahun 2011, yang memperluas *Fraud Triangle* dengan menambahkan faktor integritas, kompetensi, penegakan hukum, dan budaya etis organisasi (Tamaela et al., 2025).

Model terkini adalah *Fraud Hexagon* yang dikembangkan oleh Steve Gee dan Mark Button pada tahun 2014, yang memasukkan enam elemen kunci: tekanan, peluang, rasionalisasi, kapabilitas, arogansi, dan tingkat integritas yang rendah (Khamainy et al., 2022). Evolusi teori *fraud* ini menunjukkan pemahaman yang semakin komprehensif tentang faktor-faktor yang mendorong terjadinya kecurangan dalam organisasi.

Sistem Pengendalian Internal dan Pencegahan *Fraud*

Sistem pengendalian internal merupakan rangkaian proses yang dipengaruhi oleh jajaran eksekutif, manajerial, dan staf, bertujuan menjamin tercapainya sasaran operasional yang efektif dan efisien, pelaporan finansial yang dapat diandalkan, serta kepatuhan terhadap regulasi (Ningsih et al., 2022). Hasil tinjauan literatur menunjukkan temuan yang beragam mengenai pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud*.

Penelitian Ningsih et al. (2022), Dewata et al. (2022), dan Wibowo dan Hardiningsih (2023) mengungkapkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa. Temuan ini sejalan dengan penelitian Suryani dan Setiany (2025) yang menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengadaan pemerintah.

Namun, terdapat pula penelitian yang menunjukkan hasil berbeda. Wardani et al. (2021) dan Mansyuri dan Ramadhan (2024) menemukan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa. Perbedaan temuan ini mengindikasikan adanya faktor kontekstual yang mempengaruhi efektivitas sistem pengendalian internal dalam mencegah *fraud*.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), terdapat lima komponen utama: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. COSO (2023) dalam *Achieving Effective Internal Control Over Sustainability Reporting* menegaskan bahwa kelima komponen ini harus berfungsi secara terintegrasi untuk menciptakan sistem pengendalian internal yang efektif.

Whistleblowing System dan Pencegahan Fraud

Whistleblowing system merupakan mekanisme komprehensif yang mencakup pemberian kesempatan kepada karyawan untuk menyampaikan laporan, penerimaan dan pemrosesan laporan, serta penyelesaian masalah yang dilaporkan (Jezkova, 2023). Sistem ini semakin menjadi elemen penting dalam program pencegahan *fraud* di berbagai organisasi.

Hasil tinjauan literatur menunjukkan bahwa mayoritas penelitian menemukan pengaruh positif *whistleblowing system* terhadap pencegahan *fraud*. Wardani et al. (2021), Hambani et al. (2020), Suryani dan Setiany (2025), serta Syafitri dan Syafidinal (2023) mengungkapkan bahwa *whistleblowing system* berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa. Maulida dan Bayunitri (2021) juga menemukan bahwa *whistleblowing system* berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* secara umum.

Namun, beberapa penelitian menunjukkan hasil yang berbeda. Periansya et al. (2023) menemukan bahwa *whistleblowing system* berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dengan *fraud awareness* sebagai variabel mediasi, menunjukkan bahwa efektivitas *whistleblowing system* bergantung pada tingkat kesadaran *fraud* dalam organisasi. Mansyuri dan Ramadhan (2024) bahkan menemukan bahwa *whistleblowing system* tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa.

Menurut panduan Komite Nasional Kebijakan Governance yang dikutip oleh Hertati dan Puspitawati (2023), *whistleblowing system* memiliki tiga dimensi utama: dimensi struktural (yang mencakup pernyataan komitmen, kebijakan perlindungan pelapor, struktur pengelolaan, dan sumber daya), dimensi operasional (yang terkait dengan prosedur pelaporan dan penanganan), serta dimensi perawatan (yang mencakup pelatihan, komunikasi, dan evaluasi sistem).

E-procurement dan Pencegahan Fraud

E-procurement merujuk pada platform daring yang digunakan pemerintah untuk melakukan proses lelang dan pembelian barang dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi berbasis internet (Mansyuri & Ramadhan, 2024). Berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2012, *e-procurement* didefinisikan sebagai metode pengadaan barang dan jasa yang mengimplementasikan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Sebagian besar penelitian menunjukkan pengaruh positif *e-procurement* terhadap pencegahan *fraud*. Wardhani et al. (2021), Mansyuri dan Ramadhan (2024), Wahyuningsih et al. (2023), Suryani dan Setiany (2025), serta Afriady dan Alfiansyah (2022) menemukan bahwa *e-procurement* berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa. Septiawan dan Ningsih (2020) menambahkan bahwa implementasi *e-procurement* bersama dengan pengendalian internal dapat meningkatkan efektivitas pencegahan *fraud*.

Namun, terdapat pula penelitian yang menunjukkan hasil berbeda. Gunasegaran et al. (2023) dalam tinjauan literturnya menemukan bahwa meskipun *e-procurement* memiliki potensi untuk mencegah *fraud*, masih terdapat berbagai tantangan dalam implementasinya yang dapat mengurangi efektivitasnya.

Berdasarkan Peraturan Kepala LKPP Nomor 4 Tahun 2012, *e-procurement* mencakup beberapa dimensi utama: e-tendering (proses pengadaan secara elektronik), e-catalogue

(katalog elektronik produk dan layanan), e-purchasing (proses pembelian melalui katalog elektronik), dan Portal Pengadaan Nasional (sarana informasi pengadaan secara nasional). Keempat dimensi ini bekerja secara terintegrasi untuk menciptakan sistem pengadaan yang transparan, efisien, dan akuntabel.

Komitmen Organisasi sebagai Faktor Mediasi

Komitmen organisasi merupakan sikap dan perilaku karyawan yang menunjukkan loyalitas, keterlibatan, dan identifikasi terhadap organisasi tempat mereka bekerja. Rifai dan Mardijuwono (2020) mendefinisikan komitmen organisasi sebagai keterikatan psikologis individu terhadap organisasi yang tercermin melalui keinginan kuat untuk tetap menjadi bagian dari organisasi, kesediaan untuk bekerja keras demi kepentingan organisasi, dan penerimaan terhadap nilai-nilai serta tujuan organisasi.

Hasil tinjauan literatur menunjukkan peran penting komitmen organisasi dalam pencegahan *fraud*. Sari et al. (2025), Wibowo dan Hardiningsih (2023), serta Wardhani et al. (2021) menemukan bahwa komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa. Dwiyantri et al. (2022) menemukan bahwa komitmen organisasi bersama dengan sistem pengendalian internal dan *whistleblowing system* berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*.

Namun, beberapa penelitian menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Ulfah et al. (2024) dan Kalsum (2021) menemukan bahwa komitmen organisasi tidak berpengaruh langsung terhadap pencegahan *fraud*, tetapi berperan sebagai variabel moderasi yang memperkuat pengaruh faktor-faktor lain.

Penelitian juga menunjukkan bahwa komitmen organisasi dipengaruhi oleh sistem pengendalian internal, *whistleblowing system*, dan *e-procurement*. Aziz (2020), Ramadlan dan Yuliana (2020), serta Hoai et al. (2022) menemukan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap komitmen organisasi. Aruoren dan Oboreh (2020) menemukan hubungan antara *whistleblowing intention* dan komitmen organisasi. Ali (2025) dan Nandankar dan Sachan (2020) menemukan bahwa *e-procurement* berpengaruh terhadap komitmen organisasi.

Berdasarkan model yang dikembangkan oleh Meyer dan Allen yang dikutip dalam berbagai penelitian (Rifai & Mardijuwono, 2020; Mendis, 2024; Nashrullah et al., 2025), komitmen organisasi terdiri dari tiga dimensi: komitmen afektif (keterikatan emosional), komitmen berkelanjutan (kesadaran akan biaya meninggalkan organisasi), dan komitmen normatif (perasaan kewajiban moral untuk bertahan dalam organisasi).

Integrasi Temuan dan Gap Penelitian

Berdasarkan tinjauan sistematis terhadap 20 artikel yang relevan, ditemukan beberapa pola dan kesenjangan penelitian yang penting. Pertama, terdapat inkonsistensi dalam temuan penelitian mengenai pengaruh sistem pengendalian internal, *whistleblowing system*, dan *e-procurement* terhadap pencegahan *fraud*. Inkonsistensi ini mengindikasikan adanya faktor kontekstual, seperti karakteristik organisasi, budaya organisasi, dan tingkat kematangan implementasi sistem, yang perlu dipertimbangkan dalam penelitian mendatang.

Kedua, peran komitmen organisasi sebagai variabel mediasi atau moderasi masih belum sepenuhnya dipahami. Beberapa penelitian menemukan komitmen organisasi sebagai mediator, sementara penelitian lain menemukannya sebagai moderator. Penelitian mendatang perlu mengeksplorasi lebih dalam mekanisme bagaimana komitmen organisasi mempengaruhi hubungan antara sistem pencegahan *fraud* dengan efektivitas pencegahan *fraud*.

Ketiga, mayoritas penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Penelitian kualitatif atau mixed methods yang dapat mengeksplorasi lebih dalam dinamika

implementasi sistem pencegahan *fraud* masih terbatas. Mansyuri dan Ramadhan (2024) serta Wahyuningsih et al. (2023) merupakan contoh penelitian kualitatif yang memberikan wawasan mendalam tentang implementasi *e-procurement* dalam mencegah *fraud*.

Keempat, konteks penelitian sebagian besar dilakukan pada organisasi pemerintah atau institusi publik. Penelitian pada sektor swasta atau organisasi non-profit masih terbatas, padahal permasalahan *fraud* juga signifikan di sektor-sektor tersebut.

Kelima, dari perspektif teoritis, meskipun *Fraud Triangle* menjadi kerangka dominan, beberapa penelitian mulai mengadopsi model yang lebih komprehensif seperti *Fraud Diamond* atau *Fraud Hexagon*. Namun, penelitian empiris yang menguji model-model yang lebih komprehensif ini masih terbatas.

Implikasi Praktis

Hasil tinjauan literatur ini memberikan beberapa implikasi praktis bagi organisasi yang ingin meningkatkan efektivitas pencegahan *fraud* dalam pengadaan barang dan jasa. Pertama, organisasi perlu mengimplementasikan sistem pengendalian internal yang kuat dengan memperhatikan kelima komponen SPIP: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan.

Kedua, *whistleblowing system* perlu dirancang dengan memperhatikan tiga dimensi utama: struktural (memastikan adanya komitmen pimpinan, kebijakan perlindungan pelapor, struktur pengelolaan yang independen, dan sumber daya yang memadai), operasional (memastikan prosedur pelaporan yang mudah, jaminan kerahasiaan, dan proses investigasi yang cepat), dan perawatan (melakukan pelatihan berkala, komunikasi efektif, dan evaluasi sistem).

Ketiga, *e-procurement* perlu diimplementasikan secara komprehensif dengan memastikan keempat dimensi berfungsi dengan baik: e-tendering, e-catalogue, e-purchasing, dan Portal Pengadaan Nasional. Transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas perlu menjadi prinsip utama dalam setiap tahapan pengadaan elektronik.

Keempat, organisasi perlu membangun dan memelihara komitmen organisasi melalui tiga dimensi: komitmen afektif (membangun keterikatan emosional karyawan dengan organisasi), komitmen berkelanjutan (memberikan benefit yang kompetitif sehingga karyawan mempertimbangkan biaya meninggalkan organisasi), dan komitmen normatif (menanamkan nilai-nilai etika dan integritas sehingga karyawan merasa kewajiban moral untuk berkontribusi pada organisasi).

KESIMPULAN

Systematic literature review ini menyimpulkan bahwa pencegahan *fraud* dalam pengadaan barang dan jasa merupakan isu kompleks yang memerlukan pendekatan multifaset. Sistem pengendalian internal, *whistleblowing system*, dan *e-procurement* terbukti berkontribusi terhadap pencegahan *fraud*, meskipun dengan tingkat konsistensi temuan yang bervariasi. Komitmen organisasi memainkan peran penting sebagai variabel yang dapat memperkuat atau memediasi pengaruh sistem-sistem tersebut terhadap pencegahan *fraud*.

Dari perspektif teoritis, *Fraud Triangle* beserta pengembangannya (*Fraud Diamond*, *Fraud Scale*, dan *Fraud Hexagon*) memberikan kerangka yang komprehensif untuk memahami faktor-faktor yang mendorong terjadinya *fraud*. Sistem pengendalian internal berperan dalam mengurangi kesempatan (*opportunity*), *whistleblowing system* membantu mengurangi rasionalisasi (*rationalization*), sementara *e-procurement* meningkatkan transparansi dan mengurangi peluang manipulasi.

Inkonsistensi temuan dalam berbagai penelitian menunjukkan pentingnya mempertimbangkan faktor kontekstual dalam implementasi sistem pencegahan *fraud*. Karakteristik organisasi, budaya organisasi, tingkat kematangan implementasi sistem, dan

komitmen pimpinan merupakan faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam merancang dan mengimplementasikan strategi pencegahan *fraud* yang efektif.

Penelitian mendatang perlu mengeksplorasi lebih dalam mekanisme bagaimana komitmen organisasi memediasi atau memoderasi hubungan antara sistem pencegahan *fraud* dengan efektivitas pencegahan *fraud*. Pendekatan mixed methods yang mengkombinasikan analisis kuantitatif dengan eksplorasi kualitatif dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang dinamika pencegahan *fraud* dalam konteks yang berbeda. Selain itu, penelitian di sektor swasta dan organisasi non-profit perlu diperluas untuk memperkaya pemahaman tentang pencegahan *fraud* lintas sektor.

Keterbatasan penelitian ini terletak pada periode publikasi yang ditinjau (2020-2025) dan fokus pada literatur yang dapat diakses melalui database tertentu. Penelitian masa depan dapat memperluas cakupan tinjauan dengan periode yang lebih panjang dan database yang lebih beragam untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang perkembangan penelitian pencegahan *fraud* dalam pengadaan barang dan jasa.

REFERENSI

- Aburumman, O. J., Omar, K., Al Shbail, M., & Aldoghan, M. (2022, March). How to deal with the results of PLS-SEM?. In *International conference on business and technology* (pp. 1196-1206). Cham: Springer International Publishing.
- ACFE Global. (2022). *Occupational Fraud 2025: A Report to The Nations*. In *Association of Certified Fraud Examiners*.
- ACFE Indonesia Chapter. (2025). *Survei Fraud Indonesia 2025*. Jakarta.
- Afriady, A., & Alfiansyah, I. (2022). Pengaruh *E-procurement* Dan Religiusitas Terhadap Pencegahan *Fraud* Studi Pada Badan Pemeriksa Keuangan Aset Kota Bandung. *ProBank : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan*, 7(1), 57–63.
- Ali, Q. (2025). Transforming organizational performance through *e-procurement*. *South Asian Journal of Operations and Logistics*, 4(1), 38-48.
- Aruoren, E. E., & Oboreh, J. (2020). *Whistleblowing* intention and organizational commitment. *International Journal of Business and Social Science*, 11(3), 112-120.
- Azis, A. (2020). Sharia Internal Control towards Organizational Commitment: Implementation and its' Implication. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*, 10(3), 525-534.
- Chatzopoulou, E. C., Manolopoulos, D., & Agapitou, V. (2021). Corporate social responsibility and employee outcomes: interrelations of external and internal orientations with job satisfaction and organizational commitment. *Journal of Business Ethics*, 179(3), 795-817.
- Cherif, F. (2020). The role of human resource management practices and employee job satisfaction in predicting organizational commitment in Saudi Arabian banking sector. *International Journal of Sociology and Social Policy*, 40(7/8), 529-541.
- COSO. (2023). *Achieving Effective Internal Control Over Sustainability Reporting (ICSR): Building Trust and Confidence through the COSO Internal Control—Integrated Framework*. Durham, North California.
- Dewata, E., Farah, E. H., Jauhari, H., & Sari, Y. (2022, February). Good governance and internal control on the prevention of *fraud* in the procurement of goods and services for government agencies. In *5th FIRST T3 2021 international conference (FIRST-T3 2021)* (pp. 150-154). Atlantis Press.
- Dwiyaniti, D. A., Wicaksono, A. P. N., & Ulum, I. (2022). Internal control system, whistleblowing system, organizational commitment and *fraud* prevention: individual morality as a moderating variable. *Jurnal Akuntansi*, 9(2), 172-188.
- Flowerastia, R. D., Trisnawati, E., & Budiono, H. (2021, August). *Fraud* awareness, internal control, and corporate governance on *fraud* prevention and detection. In *International*

- Conference on Economics, Business, Social, and Humanities (ICEBSH 2021)* (pp. 235-242). Atlantis Press.
- Gunasegaran, M., Basiruddin, R., & Mohd Rizal, A. (2023). Detecting and preventing *fraud* in *e-procurement* of public sector: A review, synthesis and opportunities for future research. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 13(1), 1444-1463.
- Hafiz, J. A. (2022). Efektivitas Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (Di Kantor Pemerintah Daerah Provinsi Jambi). *Res Publica: Journal of Social Policy Issues*, 1(2), 63-71.
- Hambani, S., Kusuma, W. I. C., & Ramadianti. (2020). Analisis Faktor yang Berpengaruh Terhadap Pencegahan *Fraud* dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa (Persepsi Pegawai Dinas Pemerintah Kota Bogor) . *JURNAL AKUNIDA*, 6(2), 147–162.
- Hardiningsih, P., Udin, U. D. I. N., Masdjojo, G. N., & Srimindarti, C. (2020). Does competency, commitment, and internal control influence accountability?. *The journal of Asian finance, Economics and Business*, 7(4), 223-233.
- Herlita, S., & Bayunitri, B. I. (2021). Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan (Studi Kasus Pada Pt. Dirgantara Indonesia (Persero) Kota Bandung). *JABE: Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Ekonomi*, 7(1), 1805–1830.
- Hertati, L., & Puspitawati, L. (2023). Determinan Perilaku Etika Pada Sistem *Whistleblowing* Implikasi Pada Detection *Fraud*. *EKOMAN*, 1(1), 83–98.
- Hoai, T. T., Hung, B. Q., & Nguyen, N. P. (2022). The impact of internal control *systems* on the intensity of innovation and organizational performance of public sector organizations in Vietnam: the moderating role of transformational leadership. *Heliyon*, 8(2).
- Homann, M. (2023, October 11). What Is a *whistleblowing system*? Integrity Line.
- Indriyani, R., Surono, Safari Margapradja, H., Sari, F., & Halimahtusyahdiyah, N. (2023). Pengaruh *Whistleblowing* Dan Audit Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi (JEBMAK)*, 2(3), 635–654.
- Jama, L. A. (2023). The impact of procurement practices on organizational performance: A literature review. *Journal of Logistics, Informatics and Service Science*, 11(1).
- Jezkova, H. (2023, May 26). What is a *whistleblowing system*? FaceUp.
- Kalsum, U. (2021). Determinant of Desire to Commit *Fraud* in the Procurement of Goods/Services Within State Universities. *Eduvest-Journal of Universal Studies*, 1(5), 318-328.
- Keputusan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (n.d.). *Keputusan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*.
- Khamainy, A. H., Amalia, M. M., Cakranegara, P. A., & Indrawati, A. (2022). Financial Statement *Fraud*: The Predictive Relevance of *Fraud* Hexagon Theory. *JASF: Journal of Accounting and Strategic Finance*, 5(1), 110–133.
- Lembaga Pengadaan Secara Elektronik. (2025). *Lembaga Pengadaan Secara Elektronik 2025*.
- Mansyuri, M. I., & Ramadhan, M. S. (2024). Prevention of *fraud* in procurement of goods and services based on *e-procurement*. *Journal of Contemporary Accounting*.
- Maulana, S., I., Taufiqul Hakim, A., & Dyar, L. (2020). Analisis Determinan *Fraud* Prevention (Studi Empiris Pada Badan Usaha Milik Daerah di D.I Yogyakarta dan Jawa Tengah). *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, (Vol.13 No. 2 (2020)), 11–20. <https://doi.org/10.35143/jakb.v13i2.3604>
- Maulida, W. Y., & Bayunitri, B. I. (2021). The influence of *whistleblowing system* toward *fraud* prevention. *International Journal of Financial, Accounting, and Management*, 2(4), 275-294.

- Mendis, B. A. K. M. (2024). The Impact Of Employment Classification On Organisational Commitment: A Comparative Analysis Of Permanent And Outsourced Software Engineers Using Meyer And Allen's Three-Component Model. *European Journal of Human Resource Management Studies*, 8(2).
- Mrowiec, D. (2022). Factors influencing internal *whistleblowing*. A systematic review of the literature. *Journal of Economics and Management*, 44, 142-186.
- Nandankar, S., & Sachan, A. (2020). Electronic procurement adoption, usage and performance: a literature review. *Journal of Science and Technology Policy Management*, 11(4), 515-535.
- Nashrullah, H., Maemunah, M., & Purnamasari, P. (2025). Building Integrity From Within: The Role Of Organizational Culture And Commitment In Preventing *Fraud* In Student Organizations At Universitas Islam Bandung. *Journal of Economics and Business UBS*, 14(5), 1313-1323.
- Ningsih, D. A., Yazid, H., & Ramdhani, D. (2022). Effectiveness of the audit program, integrity and the government internal control system on prevention of *fraud* in the procurement of goods and services. *Journal of Applied Business, Taxation and Economics Research*, 1(6), 536-552.
- Ogwiji, J., & Lasisi, I. O. (2022). Internal control system and *fraud* prevention of quoted financial services firms in Nigeria: A Smart PLS-SEM approach. *European Journal of Accounting, Auditing and Finance Research*, 10(4), 1-13.
- Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik (*E-procurement*). (n.d.). *Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik (E-procurement)*.
- Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa BUMN. (n.d.). *Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa BUMN*.
- Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. (n.d.). *Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan. (n.d.). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan*.
- Periansya, P., Dewata, E., Sopiyan, A. R., Sari, Y., & Basyith, A. (2023). *Whistleblowing, fraud prevention, and fraud awareness: Evidence from the Palembang Local Government of Indonesia*. *Problems and Perspectives in Management*, 21(2), 556.
- Ramadhan, F. I., & Yuliana, R. (2020, December). Analysis of *fraud* star and organizational commitment to asset misappropriation detection with internal control system. In *International Colloquium Forensics Accounting and Governance (ICFAG)* (Vol. 1, No. 1, pp. 189-201).
- Rawung, D. T. (2020). *Bahan Ajar Diklat Statistisi Ahli Bps Angkatan Xxi Tahun 2020: Metode Penarikan Sampel*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Rifai, M. H., & Mardijuwono, A. W. (2020). Relationship between auditor integrity and organizational commitment to *fraud* prevention. *Asian Journal of Accounting Research*, 5(2), 315-325.
- Sari, A. M., Supramono, S., & Sulistyawati, A. I. (2025). The influence of organizational commitment and internal control on *fraud* prevention with good governance as a moderation. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 13(1), 621-634.

- Sekaran, U & Bougie, R. (2019). *Research methods for business: A skill building approach*. John Wiley & Sons.
- Septiawan, B., & Ningsih, D. F. (2020). The Implementation of *E-procurement* and Internal Control in Increasing the Effectiveness of the Prevention of *Fraud* in the Procurement of Goods and Services. *JRAK: Jurnal Riset Akuntansi dan Komputerisasi Akuntansi*, 11(2), 269-287.
- Sipayung, E. S. N., Yanti, H. B., & Setya, A. B. (2022, December). Impact of Anti-Fraud Awareness, *Fraud* Detection Procedures, and Technology to *Fraud* Detection Skill. In *3rd Borobudur International Symposium on Humanities and Social Science 2021 (BIS-HSS 2021)* (pp. 783-787). Atlantis Press.
- Suryani, C., & Setiany, E. (2025). The Influence of *E-procurement* Implementation, Internal Control Systems, and *Whistleblowing* Systems on Preventing Procurement *Fraud* in Government Goods and Services. *Kontigensi: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 13(1), 62-83.
- Syafitri, S. S., & Syafdinal. (2023). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan *Whistleblowing system* terhadap Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang dan Jasa. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 7(1), 866-878.
- Tamaela, F. A. F., Zamzam, I., Hormati, A., & Zainuddin, Z. (2025). *Fraud* Pentagon Theory dan Deteksi Kecurangan Laporan Keuangan: Pendekatan Beneish M-Score pada Sektor Perdagangan. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 9(2), 1548-1564.
- Tuan Mansor, T. M., Mohamad Ariff, A., & Hashim, H. A. (2020). *Whistleblowing* by auditors: the role of professional commitment and independence commitment. *Managerial Auditing Journal*, 35(8), 1033-1055.
- Ulfah, S. M., Rusydi, M. K., & Prihatiningtias, Y. W. (2024). Determinants of Government Procurement *Fraud* Prevention with Organizational Commitment and Ethical Culture as Moderating Variables.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (n.d.). *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*.
- Wahyuningsih, N., Wulansari, N. A., Pratama, N. W., & Pinandita, M. K. (2023). *E-procurement* in Preventing *Fraud* in The Procurement of Government Goods and Services at Semarang State University. *Journal of Public Administration and Government*, 5(2), 227-238.
- Wardani, D. K., Primastiwi, A., & Hanisah, H. (2021). *Fraud* prevention of government procurement of goods and services in local government. *Jurnal Akuntansi*, 25(2), 256-275.
- Wibowo, K. M., & Hardiningsih, P. (2023). Can Internal Characteristics Prevent *Fraud* in Procurement of Goods and Services?. *JABE (Journal of Accounting and Business Education)*, 7(2), 1-13.
- Widnyana, I. W., & Widyawati, S. R. (2022). Role of forensic accounting in the diamond model relationship to detect the financial statement *fraud*. *International Journal of Research in Business and Social Science* (2147- 4478), 11(6), 402-409. <https://doi.org/10.20525/ijrbs.v11i6.1924>